

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan keagenan dari suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) agar dapat melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang pada agen untuk membuat keputusan yang baik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini akan terjadi pada berbagai organisasi termaksud dalam organisasi pemerintahan dan fokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus mengawasi kerja agen agar organisasi dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2000).

Faristina, 2011 menjelaskan hubungannya dengan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya. Berkaitan dengan masalah keagenan, teori ini merupakan suatu konsep yang didasari dalam praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik. Laporan keuangan sektor publik, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi secara transparansi yang bersifat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan agar melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui waktu-waktunya.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah selaku instansi atau pengelola pemerintahan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dimana tentunya masyarakat berharap pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik, yang terlihat dari laporan keuangan yang transparan

dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, jika pemerintah bekerja dengan baik maka rakyat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya adalah jika kinerja pemerintah baik maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri. Dimana masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen.

2.2 Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Syarmenda (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang status keuangan dan semua transaksi entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil yang diperoleh pihak yang berwenang berupa pelaporan keuangan organisasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan informasi mengenai status keuangan organisasi kepada pihak yang membutuhkan.

2.2.2 Tujuan Umum Laporan Keuangan

Rudianto (2012) mengatakan tujuan umum penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

1. Agar dapat memberikan informasi keuangan yang bisa dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Agar dapat memberikan informasi yang bisa dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.

3. Agar dapat memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Agar dapat memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Agar dapat memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Agar dapat mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Adha (2014) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah yang mendukung pengambilan keputusan ekonomin, sosial dan politik meliputi informasi sebagai berikut:

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
2. Mengevaluasi status keuangan dan hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan masalah keuangan dan peraturan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas,

Kesimpulan dari manfaat laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan tentang status keuangan organisasi untuk dipertimbangkan.

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan

PSAP No. 01 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual (2010) menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran memberikan gambaran umum sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

daerah/pusat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Oprasional
Laporan oprasional menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas oprasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas selama tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar

Akunatnsi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah bahwa laporan keuangan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan oprasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.5 Pengertian Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan dengan informasi lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi keuangan. Hal yang dimaksud adalah seperti informasi sumber daya organisai yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Syarmenda, 2015). Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan daerah merupakan laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Perbedaan interpretasi diatas dapat mengarah pada kesimpulan bahwa laporan keuangan daerah merupakan informasi mengenai status keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pihak-pihak terkait akan menggunakan informasi tersebut untuk melihat status keuangan suatu organisasi.

2.2.6 Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standart Board* (GASB, 1998) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah agar bertanggungjawab kepada publik.
2. Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, kemampuan atau sumber daya yang guna memperoleh informasi dan oleh sebab itu pihak terkait menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi yang penting.

Menurut Asroel (2015) tujuan dari pelaporan keuangan adalah harus memenuhi tingkat pengungkapan laporan keuangan dan informasi oprasi seluruh organisasi, dan menyediakan data yang cukup. Oleh karna itu, dapat disimpulkan dari kedua penjelasan diatas bahwa pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai status keuangan organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2.2.7 Pengertian Transparansi

Transparansi didirikan berdasarkan arus informasi yang bebas. Semua sistem pemerintah, lmbaga-lembaga, dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang ada harus memadai supaya dapat dimenegerti dan dipantau. *United Nation Development Program* (UNDP) mengemukakan transparansi merupakan sistem informasi yang dikembangkan kemudian memungkinkan masyarakat mampu mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik.

Maani (2009) menjelaskan transparansi setidaknya mempunyai tiga aspek kritis :

1. Bersangkutan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*).
2. Kejelasan peran dan tanggungjawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukannya transparansi.
3. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu dan jaminan informasi yang tersistematik.

Ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain, sebab ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup jika tidak memiliki penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang terjadi, dimana semua itu harus berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

Menurut Hafiz (2000) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara umum dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah sumber daya yang dipercayai dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan peraturan No. 24 tahun 2005 yang menguraikan masalah transparansi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, serta masyarakatpun berhak melihat secara terbuka dan menyeluruh berdasarkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatur sumber daya dan ketaatannya pada peraturan undang-undang yang berlaku. Kedudukan prinsip transparansi dalam implementasi konsentrasi konsep *good goverance* sangat penting. Hal tersebut karena mempermudah publik memahami dan berpartisipasi dalam proses-proses berkepentingan secara nyata. Transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara *stakeholder* dengan pemerintah (Iswahyudi dkk, 2016).

2.2.8 Bentuk-Bentuk Transparansi

Menurut Adha (2014), ada beberapa bentuk transparansi sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas
Memberikan informasi yang jelas sangat penting karena memudahkan semua pihak yang mengakses informasi laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tersebut tanpa mengalami kesulitan.
2. Kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan
Suatu organisasi wajib menyediakan akses informasi yang mudah untuk didapatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi.
3. Meningkatkan arus informasi
Menerapkan transparansi tidaklah mudah pasti memiliki beberapa hambatan yang akan muncul yang disebabkan berbagai faktor, maka dari itu untuk menjaga kestabilan dalam penerapan transparansi dibutuhkan peningkatan arus informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang menerus memberikan keupdatean data yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi dapat berupa pemberian informasi yang jelas kepada yang membutuhkan, kemudahan memperoleh informasi, pembentukan mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi.

2.2.9 Prinsip Transparansi Pelaporan Keuangan

Prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, hasil yang dicapai, dan pelaksanaan. Loina (2003) menjelaskan prinsip ini menekankan kepada 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu komunikasi publik oleh organisasi. Kedua yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi.

Indikator-indikator dari transparansi menurut Loina (1993) adalah sebagai berikut:

1. Jelasnya tanggung jawab tentang penyediaan informasi.
2. Mengatur suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pemerintah untuk membayar uang suap.
3. Mempermudah akses informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2.2.10 Tujuan Transparansi

Sari (2017) menjelaskan tujuan dari transparansi yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* dan lembaga terhadap pengelolaan keuangan yaitu :

1. Menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menyingkirkan kesalahan komunikasi dan perbedaan pendapat.
3. Memotivasi masyarakat agar selalu bertanggungjawab pada pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menciptakan keyakinan atas seluruh pihak dari aktivitas yang dilakukan.
5. Terwujudnya pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan lain-lain universal.

2.2.11 Manfaat Transparansi

Sari (2017) mengatakan terdapat manfaat penting dari adanya penerapan transparansi pelaporan keuangan yaitu :

1. Menghindari korupsi
2. Mempermudah untuk mengidentifikasi kelemahan kekuatan kebijakan
3. Menciptakan suasana investasi yang baik juga meningkatkan kepastian usaha.
4. Menguatnya kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi.
5. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat bisa mengukur kinerja lembaga.

2.2.12 Indikator-indikator Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Ridho dan Basuki (2012) terdapat beberapa indikator transparansi pelaporan keuangan, yaitu:

1. Keberhasilan pencapaian
Keberhasilan OPD terletak pada kemampuan anggota untuk bekerja di OPD akan menentukan suatu anggapan. Jika OPD berhasil menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan semakin percaya dengan segala kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh OPD.
2. Keberhasilan pencapaian
Tidak menutup kemungkinan apabila OPD mengalami ketidakberhasilan dalam suatu hal, salah satunya adalah laporan keuangan yang mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut. Ketidakberhasilan tetap harus dipublikasikan kepada publik, karena publik yang mengerti akan penyebab ketidakberhasilan akan menyadari hal tersebut. Informasi untuk saat ini menjasi suatu hal wajib untuk dipublikasikan.
3. Akurat dan tepat waktu
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu penyusunan laporan keuangan membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu.
4. Informasi *input*, *output*, dan *outcome*

Informasi keuangan mengenai *input*, *output*, dan *outcome* merupakan informasi yang penting bagi pihak yang membutuhkan, karena dianggap mampu mempengaruhi hal-hal penting yang akan dilakukan oleh pihak terkait.

5. *Akses stakeholder*

Bagian dari penyusunan laporan keuangan ini adalah bagian yang sangat penting, karena mereka memang memahami seluk beluk penataan, sehingga perlu menjalin kontrak dengan para pemangku kepentingan agar pihak-pihak tersebut dapat memahami situasi keuangan organisasi.

2.3 Tekanan Eksternal

2.3.1 Pengertian Tekanan Eksternal

Syarmenda (2016) menjelaskan tekanan eksternal merupakan tekanan yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi rendah terutama yang terkait pada penerapan suatu kebijakan ataupun prosedur. Masruroh (2015) juga menjelaskan tekanan eksternal merupakan hal yang berhubungan pada tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan, masyarakat, eksekutif, dan lainnya.

2.3.2 Macam-Macam Tekanan Eksternal

Yesnita (2016) menjelaskan macam-macam eksternal sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh politik

Politik merupakan salah satu bentuk dari tekanan eksternal, yang mana perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh politik akan menghasilkan praktik-praktik yang bisa terjadi dalam organisasi khususnya terkait dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini tentu hanya bersifat formalitas yang ditunjukkan untuk mendapatkan legitimasi.

2. Adanya peraturan undang-undang (regulasi)

Untuk mengatur praktik yang ada agar menjai lebih baik maka diterapkannya suatu peraturan. Akan tetapi disisi lain akan menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk mendapatkan legitimasi saja,

sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi dipandang baik oleh pihak luar.

2.3.3 Indikator-Indikator Tekanan Eksternal

Ridha dan Basuki (2012) menjelaskan beberapa indikator tekanan eksternal sebagai berikut :

1. Undang-undang dan peraturan
Undang-undang merupakan peraturan untuk menerapkan transparansi, terdapatnya undang-undang yang sudah dicantumkan sanksi mengenai penerapan transparansi, sehingga mempermudah suatu organisasi untuk menerapkan transparansi tersebut. Adanya sanksi akan membuat suatu organisasi berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Tuntutan pihak terkait
Tuntutan dari Bupati/Gubernur serta dari seorang pengusaha dalam penerapan transparansi tentu akan menimbulkan dampak positif. tuntutan itu akan menjadi faktor penting agar tercapainya penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Tekanan media masa
Dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan media masa memiliki peran yang penting, mereka menuntut laporan keuangan yang tepat dan akurat agar selalu dapat dipublikasikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut agar mudah diduplikasinya.
4. Kritikan masyarakat
Timbulnya kritikan dari masyarakat akan membuat suatu penerapan transparansi pelaporan keuangan yang kuat sebab kritikan masyarakat yang baik akan mendirikan transparansi tersebut.
5. Perhatian lembaga masyarakat
Lembaga kemasyarakatan dapat menyampaikan aspirasinya guna transparansi terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat.

2.4 Ketidakpastian Lingkungan

2.4.1 Pengertian Ketidakpastian Lingkungan

Richard L. Daft (2010:94) menjelaskan ketidakpastian lingkungan yakni seorang manajer tidak banyak memiliki informasi mengenai faktor-faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Luthans (2005) berpendapat yaitu ketidakpastian lingkungan adalah keadaan dimana seseorang bermaksud untuk memprediksi situasi disekeliling yang mengakibatkan dirinya menjalankan suatu perbuatan untuk menemui ketidakpastian tersebut. Tanggapan ketidakpastian lingkungan bisa diartikan sebagai tanggapan karyawan mengenai lingkungan yang dihadapi karyawan di tempat mereka bekerja. Faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan yaitu ketidakpastian lingkungan (Duncan, 1972).

Pengertian lain mengenai ketidakpastian lingkungan juga dijelaskan oleh Akhmad dan M. Jauhar (2013:187) yaitu ketidakpastian lingkungan merupakan dimana pimpinan organisasi tidak memiliki informasi yang bulat mengenai kondisi lingkungannya yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam memperkirakan perubahan-perubahan lingkungan yang akan tumbuh, ketidakpastian ini memicu tindakan-tindakan yang akan dipegang oleh organisasi mempunyai resiko kegagalan yang besar.

2.4.2 Indikator-indikator Ketidakpastian Lingkungan

Menurut Ridha dan Basuki (2012) ketidakpastian lingkungan memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Hubungan dengan lingkungan yang stabil
Ketidakpastian itu sendiri terjadi karena adanya perubahan aturan dalam waktu ketidakpastian tersebut. Jika organisasi ingin memaksimalkan transparansi, diharapkan dapat menjaga kestabilan ketidakpastian lingkungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Perbaikan legitimasi

Legitimasi dipandang sebagai ide yang menyamakan atau berasumsi bahwa tindakan yang diambil oleh entitas adalah tindakan yang diinginkan dan sesuai, atau sesuai dengan norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

3. Informasi keuangan yang positif maupun negatif

Menurut fakta, pemberian informasi keuangan harus akurat karena kedua belah pihak membutuhkan informasi positif ataupun negatif secara relevan.

4. Adopsi konsep

Menerapkan konsep transparansi belakangan ini menjadi tren didunia keuangan karena menjadi tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola oemerintah yang baik. Meniru konsep transparansi organisasi lain yang telah berhasil merupakan salah satu cara atasan yang diberikan kepada bawahannya agar bisa dicontoh.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian merupakan sejumlah faktor yang mendorong organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Organisasi akan mengalami ketidakpastian yang besar jika faktor-faktor eksternal berubah secara cepat. Daft (2010 : 95-98) mengemukakan apabila sebuah organisasi bertemu dengan ketidakpastian yang meningkat dimana yang berhubungan dengan pelanggan, persaingan, peraturan pemerintah, atau pemasok, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini diantaranya :

1. Peran-peran perluas batas

Departemen-departemen dan peran-peran perluas batas (*boundary spanning roles*) mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Mereka yang melukukan perluasan batas dapat mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan-perubahan lingkungan dan mereka mewakili kepentingan organisasi pada lingkungan. Perluasan batasan adalah tugas yang semakin lama semakin penting dalam organisasi-organisasi sebab perubahan-perubahan lingkungan bisa terjadi sangat cepat. Para manajer membutuhkan informasi yang baik

tentang pelanggan dan pesaing mereka, dan unsur-unsur lingkungan lainnya supaya bisa membuat keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, perusahaan yang paling sukses bekerjasama setiap dalam aktivitas perluasan batas.

2. Rekanan antar organisasi

Kini prosedur yang semakin populer dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan usaha yakni meminimalisir batasan-batasan dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya. Manajer yang organisasinya menjadi rekanan juga memiliki orientasi yang bertolakbelakang. Model kerjasama baru inipun dapat diikan dengan seringnya melakukan pembagian informasi.

3. Marger dan joint venture

Setingkat lebih dari strategi rekanan bagi perusahaan yaitu melakukan melakukan merger atau *joint venture* agar dapat mengurangi ketidakpastian lingkungan. Merge adalah gabungan dari dua atau lebih suatu organisasi yang menjadi satu.

Ketidakpastian lingkungan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memprediksi keadaan secara akurat, yang mana apabila ketidakpastian lingkungannya tinggi maka tidak akan bisa memprediksi dan tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah dan begitupun sebaliknya, apabila ketidakpastian lingkungannya rendah maka individu akan mampu memprediksi keadaan sehingga bisa menolong dalam perencanaan perusahaan secara akurat.

2.4.4 Pengaruh Lingkungan

Akhmad dan M. Jauhar (2013 : 191-194) mengatakan pengaruh lingkungan dalam organisasi sebagai berikut :

1. Ketergantungan sumber

Oganisasi memiliki ketergantungan ganda kepada lingkungannya. Produk dan jasa yang mewujudkan output organisasi yang dikonsumsi dalam lingkungan oleh pemakainya. Di sisi lain, organisasi juga memperoleh berbagai macam jenis input dari lingkungannya. Jika peraturan input dan outoput ini tidak seimbang maka kedudukan organisasi menjadi berbahaya.

Ada dua cara penyesuaian yang bisa dilakukan oleh organisasi. Yang pertama melalui perubahan internal, dimana dengan menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, perencanaan, dan aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Kedua yaitu dengan berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2. Kompleksitas struktur organisasi

Apabila lingkungan bertahan kompleks, maka organisasi pun harus dapat lebih kompleks supaya dapat menghadapinya. Setiap elemen dari lingkungan harus dihadapi oleh bagian khusus dari organisasi. Oleh sebab itu organisasi yang terdapat di lingkungan yang kompleks seharusnya mempunyai lebih banyak bagian ataupun jenis tugasnya.

3. Peredam

James Thompon menjelaskan organisasi sebagai salah satu inti teknis pelaksanaan produksi yang dikelilingi oleh sejumlah elemen peredam. Pusat teknis yaitu bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi. Bagi setiap segmen lingkungan digunakan satu bagian peredam kasus. Bagian peredam ini berusaha membentuk kondisi inti teknis jadi seperti sebuah sistem tertutup supaya dapat berfungsi dengan cara yang efisien. Bagian penelitian dan pengembangan (litbang), keterangan, penjualan, pembelian, dan lain-lain merupakan bagian-bagian dari peredam.

4. Elemen-elemen pembatasan (*Boundary Spanning*)

Elemen-elemen pembatasan menyelaraskan dan menghubungkan organisasi pada unsur-unsur penting dari lingkungan. Baik organisasi maupun individu. Posisi ini dijadikan oleh elemen-elemen pembatasan melalui pertukaran informasi antara lingkungan dan organisasi, kemudian rencana maupun kegiatan bisa dikoordinasikan, dan ketidakpastian bisa dikurangi.

2.5 Komitmen Manajemen

2.5.1 Pengertian Komitmen Manajemen

Nadirsyah (2008) menjelaskan komitmen manajemen merupakan suatu dukungan dan keyakinan yang kuat dari manajemen untuk menjalankan, melakukan, dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan secara bersamaan kemudian tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat tercapai. Agar efektif untuk mencapai sasaran organisasi pejabat pimpinan harus bertanggungjawab atas jalannya organisasi dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian sumber daya (Mukjizat, 2000 dalam Saputra, 2015).

Solin (2013) menjelaskan komitmen manajemen adalah komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis berupa karakteristik hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya, serta mempunyai implikasi terhadap keputusan individu agar dapat melanjutkan keanggotaannya pada organisasi tersebut.

Kesimpulan dari pendapat tentang komitmen manajemen diatas adalah suatu keinginan antar organisasi dengan individu yang baik untuk saling menyelaraskan pemikiran serta saling bekerja sama guna tercapainya tujuan yang maksimal dalam organisasi.

2.5.2 Komponen Komitmen Manajemen

Masruroh (2015) menjelaskan terdapat 3 komponen dalam komitmen manajemen yaitu sebagai berikut :

1. **Komponen afektif**
Komponen ini terjadi jika karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi sebab adanya ikatan emosi.
2. **Komitmen continue**
Komponen ini timbul apabila karyawan tetap betahan pada suatu organisasi karena membutuhkan keuntungan-keuntungan seperti gaji dan sebagainya.
3. **Komitmen normatif**

Komitmen normatif timbul karena nilai-nilai karyawan. Karyawan menetap menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa berkomunikasi terhadap organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Dapat disimpulkan dari definisi di atas yaitu komponen komitmen manajemen merupakan suatu komitmen yang terjadi disebabkan oleh beberapa keinginan ataupun kondisi yang dihadapi oleh masing-masing individu supaya bisa tetap bertahan dalam sebuah organisasi tersebut.

2.5.3 Indikator-Indikator Komitmen Manajemen

Ridha dan Basuki (2012) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator dalam komitmen manajemen yaitu sebagai berikut :

1. Keinginan menjadi pimpinan
Seorang individu pasti ingin menjadi pemimpin, hal ini dapat mempengaruhi penerapan transparansi karena komitmennya untuk memimpin suatu organisasi.
2. Perbaikan ketrampilan staf
Seorang individu mampu membenahi kemampuan dan keterampilannya dalam penerapan transparansi jika pimpinan dapat memotivasi bawahannya, sebab kemampuan SDM sangat berpengaruh penting dalam keberhasilan.
3. Pendidikan berkelanjutan
Diperlukannya pendidikan yang berkelanjutan oleh staff dalam suatu organisasi, contohnya dengan diadakan pelatihan-pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang baik.
4. Membangun budaya etis
Budaya etis dapat membentuk komitmen yang baik juga antar individu untuk bekerjasama. Penerapan transparansi yang optimal akan terjadi jika terdapat kerjasama yang sehat dan baik.
5. Kebutuhan OPD
Kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat tentunya berpengaruh dalam penerapan transparansi. Masyarakat guna mendapatkannya haknya untuk menyampaikan aspirasinya dalam memperoleh informasi.

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.6.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi (Darwanis & Mahyani, 2009). Sebab sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai (Indriasih, 2014).

Guna menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut (Tjiptoherijanto, 1990). *Responsibility* atau tanggung jawab tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, maka sumber daya tersebut tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.6.2 Karakteristik kompetensi

Menurut Spencer (1993) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kemampuan seseorang yang terbentuk dari informasi yang dimiliki dalam bidang kajian tersebut.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.
3. Motif (*motive*) merupakan sesuatu yang konsisten dipikirkan atau diinginkan sehingga menyebabkan suatu tindakan.
4. Sifat (*traits*) merupakan karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
5. Konsep diri (*self-concept*) merupakan gambaran tentang nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan diri atau sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

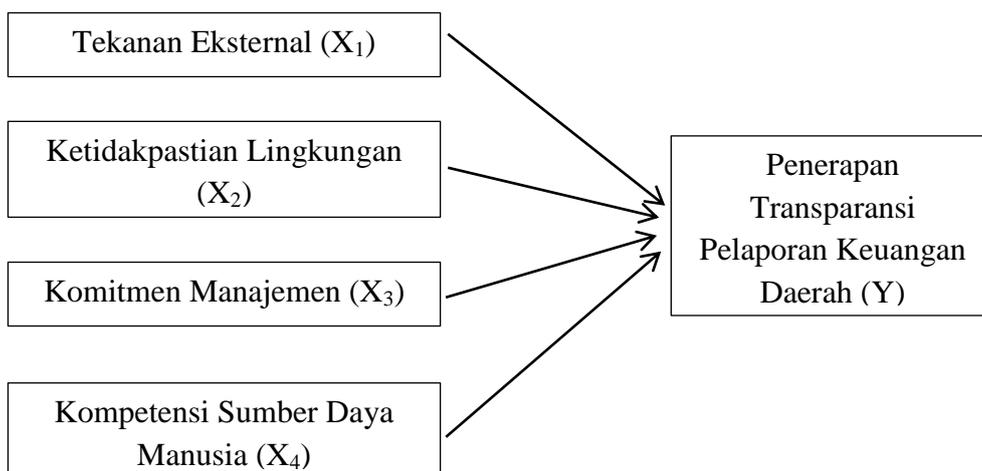
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Rian Noprizal (2017)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen :</p> <p>Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Sistem Pengendalian Pemerintah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan sistem pengendalian pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah
Nanda Lisriani (2019)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	<p>Variabel Independen :</p> <p>Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Penerapan Transparansi Pelaporan</p>	Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dan kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap penerapan

		Keuangan	transparansi pelaporan keuangan.
Nadia Davici (2018)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam)	<p>Variabel Independen :</p> <p>Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Transparansi Pelaporan Keuangan</p>	Tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan komitmen pimpinan dan faktor politik berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi laporan keuangan.
M. Ade Kasfauzi (2016)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	<p>Variabel Independen :</p> <p>Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Tekanan eksternal, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
Karina Dwi	Pengaruh Tekanan Eksternal,	Variabel	Tekanan eksternal,

Pradita, dkk (2019)	Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	<p>Independen :</p> <p>Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan</p>	ketidakpastian lingkungan lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
---------------------------	--	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran menggambarkan tentang pola hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan Variabel Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi pelaporan Keuangan. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Tekanan eksternal yaitu suatu tekanan yang berawal dari suatu entitas. Tekanan eksternal mampu mempengaruhi suatu organisasi untuk melangsungkan kegiatan-kegiatannya. Setyowati (2017) mengemukakan biasanya tekanan eksternal berupa peraturan pemerintah, Lembaga Swadayan Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga-lembaga formal serta non-formal lainnya. Agar sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik maka perlu dibentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur jalannya organisasi (terutama Organisasi Perangkat Daerah).

Hasil penelitian (Pradita dkk, 2019) membuktikan bahwa tekanan eksternal memiliki nilai positif dengan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian (Primastiwi, 2016) juga membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan oprasional. Adapun hasil penelitian Andriyani (2016) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Pelalawan menunjukkan tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya masyarakat, ataupun dorongan dari pihak tertentu mempercepat proses transparansi untuk dilakukan dalam penyajian laporan keuangan.

Kemudia dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan eksternal dalam suatu organisasi maka akan berpengaruh kepada peningkatan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

2.9.2 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Govindarajan (1984) berpendapat ketidakpastian mengakibatkan suatu organisasi dapat menggiatkan proses dan strukturnya. Perubahan organisasi baik proses ataupun struktur yang terdapat pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan bukanlah hal mudah. Ketidakpastian organisasi terhadap suatu standar berupa perubahan yang akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam perubahan ke peraturan yang baru. Pemimpin organisasi dalam kondisi yang tidak pasti akan memutuskan bahwa responden terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan mengikuti organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradita dkk, 2019) membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki nilai positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Fardian (2014) di SKPD Kota Padang menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan, karena diyakini ketika terjadi ketidakpastian lingkungan maka pimpinan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi lain yang telah berhasil menerapkan transparansi seperti dengan mengadakan studi banding dengan organisasi lain.

Ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi dimana organisasi tidak yakin dengan cara melakukan sesuatu baik berupa sistem atau juga peraturan terkait dalam berproses. Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan bagian dari sebuah sistem dalam mewujudkan hasil laporan keuangan yang transparan dan merupakan tuntutan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Jika terdapat ketidakpastian lingkungan dalam organisasi akan membuat ketidakmengertian sebuah organisasi dalam menjalankan sesuatu, dalam konteks ini bagaimana cara menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Suatu organisasi akan merespon hal ini dengan cara mencontoh organisasi yang sudah dianggap sukses dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Meningkatnya ketidakpastian lingkungan memicu meningkatnya penerapan

transparansi pelaporan keuangan. Semakin meningkat ketidakpastian di organisasi akan mendorong organisasi untuk mampu menyesuaikan dengan lingkungan barunya sehingga ketika organisasi sudah siap dengan segala keadaan maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

2.9.3 Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Amelia (2015) menjelaskan komitmen merupakan suatu kondisi dimana seorang individu memihak organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan anggotanya dalam keorgasisasinya. Sedangkan komitmen manajemen dalam hal ini tergantung dengan integritas manajemen dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen ditunjukkan dengan adanya individu yang rajin memperbaiki keterampilannya khususnya agar dapat mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan daerah, selanjutnya masing-masing individu berusaha untuk membangun budaya etis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradita dkk, 2019) menjelaskan bahwa komitmen manajemen memiliki nilai positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Noprizal, 2017) yang dilakukan pada SKPD Indragiri Hulu yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Adapun hasil penelitian Kasfauzi (2016) dilakukan pada SKPD Kabupaten Kampar yang menunjukkan bahwa variabel komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Apabila diberikan akses atau kemudahan dalam memperoleh informasi tentang pelaporan keuangan maka akan mendorong meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Sehingga dapat disimpulkan jika komitmen manajemen yang tinggi pada suatu organisasi maka akan mendorong penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah menjadi maksimal, karena individu sangat mempengaruhi kelangsungan suatu organisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

2.9.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Mangkunegara (2012:40) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan, dan kemampuan serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kompetensi sumber daya manusia merupakan dasar dedeorang untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Widodo (2001:15) menyatakan bahwa terwujudnya penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan mutu sumber daya manusia yang bisa mengaplikasikan logika akuntansi pada pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Mutu sumber daya manusia merupakan modal utama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai untuk membuat pencatatan laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hamdi, 2017) yang dilakukan pada SKPD Indragiriri Hulu menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika kompetensi sumber daya baik, maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan berjalan dengan baik pula. Adapun hasil penelitian yang dilakuka oleh (Ferdian, 2014) yang dilakukan di SKPD Pemerintahan Kota Padang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kota Padang.

Sumber daya manusia dituntut untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Dari kompetensi sumber daya manusia dapat sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta transparan agar mudah dimengerti para penggunanya. Sumber daya manusia yang tidak kompeten dapat berakibat fatal terhadap suatu instansi. Dalam hal pelaporan keuangan, sumber daya manusia yang tidak kompeten dapat berakibat pada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan logika akuntansi. Penerapan transparansi pelaporan keuangan yang tinggi sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah